

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang wajib diberikan kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara serta bukan merupakan penalty. Pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga (kekuatan fisik, keterampilan, keahlian, atau harta benda) seperti hasil numi dan barang-barang lainnya. Namun, pada zaman sekarang pajak yang diberikan pada umumnya berupa uang.

Penerimaan pajak yaitu pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak ini dilakukan agar dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan yang telah rusak, pembuatan jembatan, sekolah, dan rumah sakit/puskesmas.

Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan dan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat baik yang memiliki usaha ataupun tidak. Pemungutan pajak tersebut digunakan untuk keperluan Negara dan digunakan untuk kemakmuran Negara. Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang terdiri atas PPh, PPn, dan PPn-Bm. Pemungut pajak didalam pusat adalah pemerintah pusat untuk

digunakan agar dapat membiayai keperluan Negara dan untuk pemungut pajak didalam daerah adalah pemerintah daerah dan akan dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah.

Penerimaan pajak yaitu suatu sumber utama penghasilan Negara, sehingga Direktorat Jendral Pajak melakukan beberapa cara agar dapat menambah penghasilan Negara, serta menambah jumlah wajib pajak orang pribadi aktif, meningkatkan beberapa tarif pajak tertentu, juga dapat memperluas sebagian objek pajak, dan pajak lain-lain. Selain itu, cara yang dilakukan adalah perubahan sistem perpajakan yang dulunya diisi oleh karyawan pajak diganti dengan pengisian, perhitungan, serta pelaporan pajak yang akan dilakukan secara manual oleh masing-masing wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kepercayaan agar dapat menentukan sendiri seberapa besarnya pajak yang harus dibayarkan pada kantor pajak. Namun, pemerintah bersikap adil dalam menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi .

Akan tetapi dalam implementasinya, dengan menggunakan sistem pembayaran pajak maka akan sangat sulit untuk dijalankan, terkadang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena masih sangat minim tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak perusahaan . Maka, permasalahan ini merupakan salah satu tugas pemerintah agar lebih tegas lagi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya adalah kualitas pelayanan pada kantor pajak yang kurang memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas wajib pajak, dan sistem yang sulit dipahami oleh wajib pajak. Dengan adanya kondisi tersebut menimbulkan motivasi untuk melakukan penulisan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.

Pajak pada KPP Pratama Tulungagung dalam perkebangannya sangat baik, karena tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penyebab berkembangnya pajak meningkat karena wajib pajak orang pribadi yang suka lalai dalam membayar, maka petugas pajak akan mengirimkan surat penagihan kepada wajib pajak tersebut, apabila wajib pajak tidak respon maka pihak pajak akan mendatangi kerumah wajib pajak langsung. Sedangkan wajib pajak yang patuh pada KPP Pratama Tulungagung bisa dikatakan sangat patuh, karena wajib pajak dari tahun ketahun meningkat disebabkan karyawan pajak sangat tegas dalam menagih wajib pajak yang suka lalai terhadap kewajibannya yang awalnya hanya berupa surat yang dikirimkan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan sekarang pihak pajak langsung mendatangi rumah wajib pajak yang bersangkutan agar mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Tulungagung yaitu kurangnya fasilitas seperti : kurangnya tempat bebas *smoking*, AC

kurang memadai, kurangnya browsur, kurang luas tempat penyimpanan dokumen.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri, kepatuhan dalam melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak yang terutang, dan kepatuhan dalam pembayaraan suatu tunggakan yang disengaja maaupun tidak disengaja.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul laporan yang diambil oleh penulis, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung tahun 2015 sampai 2018?
2. Seberapa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Tahun 2018 sampai 2019 di KPP Pratama Tulungagung?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang didapatkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung tahun 2018 sampai 2019.
2. Untuk mengetahui seberapa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. Batasan Masalah

Agar hasil lebih spesifik dan tidak menyimpang maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penulisan ini lebih menitik beratkan pada Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Pribadi di KPP Pratama Tulungagung tahun 2018 sampai 2019, Seberapa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tulungagung, dan Hambatan apa saja yang dihadapi oleh KPP Pratama Tulungagung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penulisan

Adapun penelitian saat ini dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas berhubungan dengan surat pemberitahuan tahunan, serta tingkat efektivitas penyampaian.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kantor pelayanan pertama tulungagung dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan bisa mempermudah bagi mahasiswa yang membaca dan dapat berguna jika suatu saat menghadapi permasalahan yang sama atau yang berniat melanjutkan penelitian ini.